

RENJA

RENCANA KERJA 2025









KATA PENGANTAR

Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Nunukan diarahkan pada pengembangan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada ketersediaan dan keragaman bahan pangan yang bermutu dengan harga yang terjangkau, didukung oleh kebijakan perekonomian yang kondusif bagi pengembangan industri pertanian yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Sesuai maksud tersebut diatas dalam melaksanakannya perlu dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan yang penyusunannya mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja dimulai melalui tahapan penyusunan Rencana Kerja yang mengacu kepada rancangan awal RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebelumnya dan mengadopsi usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Untuk itu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini merupakan dasar dalam pelaksanaan forum SKPD dan penetapan Renja dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan.

Akhirnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini untuk kepentingan Pembangunan Pertanian pada umumnya dimasa mendatang khususnya di Kabupaten Nunukan .

Nunukan, Juli 2024

KEPALA DINAS,



MUHTAR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19661212 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 1
1.3 Maksud dan Tujuan..... 4
1.4 Sistematika Penulisan..... 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 23
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 52
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 54
4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025 54
BAB V PENUTUP 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Pengawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2024..... 21

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2023 22

Tabel 2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025 24

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan 2025 45

Tabel 2.5. Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Nunukan 2025..... 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Lampiran 2. Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

Lampiran 3. Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023

Lampiran 4. Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Lampiran 5. Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Ketahanan dan Pertanian Kabupaten Nunukan sebagai entitas pelaksana tugas dengan urusan di bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketersediaan pangan) serta menjalankan fungsi penyuluhan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut tidak terlepas dari kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku diantaranya penyusunan rencana-rencana strategis dinas dalam bentuk Rencana Strategis selama lima tahun dan Rancangan Awal Rencana Kerja satu tahunan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dibidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan penyuluhan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) juga merupakan dokumen penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam penyusunannya Rencana Kerja (Renja) SKPD dimulai dari persiapan penyusunan Rancangan Renja SKPD yang kemudian akan dituangkan kedalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ranwal Renja SKPD inilah setelah melalui pembahasan di tingkat forum SKPD yang bertujuan untuk memadukan rencana teknis SKPD dengan usulan masyarakat selanjutnya akan dimatangkan pada musrenbang RKPD. Hasil perumusan akhir rancangan RKPD akan ditetapkan menjadi dokumen RKPD dalam bentuk Peraturan Bupati sedangkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD akan menjadi Dokumen Renja SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan masa tahun pertama dari Renstra 2025-2026 dengan demikian dalam kaitan itu maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 akan tetap memedomani Perencanaan yang lebih tinggi yang telah ada dan didasari atas evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya serta menyelesaikan target-target pelaksanaan Renstra Dinas sebelumnya dan ditambah dengan target yang akan dicapai Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2026.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan meliputi:

1. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

1.3 Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disusun dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan urusan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketersediaan pangan) dan penyuluhan lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD antara lain:

a. Sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025 .
b. Memberikan arahan seluruh staf/pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode Renja;
c. Menjadi acuan untuk menjabarkan program pembangunan ke dalam kegiatan operasional yang lebih teknis sesuai skala prioritas, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia;
d. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai suatu tujuan organisasi;
e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian melalui kemudahan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan.

Dalam Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025 mengacu pada Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 129 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari :

BAB I **PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan rencana kerja

BAB II **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi tentang Evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BABA IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana kerja dan pendanaan Program, dan Kegiatan SKPD

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana Tindak lanjut dan harapan dari Kepala SKPD.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dalam melakukan evaluasi pencapaian hasil kegiatan diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Penjelasan evaluasi rencana kerja tahun 2023 secara naratif dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan

   Sasaran 1 (satu) sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2021-2026 ditunjang dengan 4(empat) program, 6 (enam) kegiatan. Berikut capaian kinerja pada sasaran 1 disajikan dalam tabel :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	55,31%	70,18%	126,88%
		Presentase Ketersediaan Pangan	87,45%	83,93%	95,97%

Indikator sasaran kinerja 1 ini adalah sebagai berikut :

- Pencapaian Persentase Skor PPH (Pola Pangan Harapan). Realisasi capaian kinerja adalah sebesar 70,18. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan,ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH.

  Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2023, skor PPH Kabupaten Nunukan sebesar 70,18 lebih besar dari target yaitu 55,31 (capaian sebesar 126,88%).

Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangandan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa.

Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan. Proporsi konsumsi energy untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Deptan tahun 2001 yaitu : (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain lain (bumbu) 3%. Selanjutnya, berdasarkan hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan dengan masing masing pembobotnya diperoleh skor PPH. Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100. Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun, serta vitamin dan mineral/ zat pengatur). Ketiga fungsi zat gizi tersebut memiliki proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 33.3% (berasal dari 100% dibagi 3). Pembobotan tersebut adalah sebagai berikut: a) Untuk kelompok pangan sumber karbohidrat (padi padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula), total kontribusi energi (%AKG) adalah 74%. Bobot untuk kelompok pangan ini adalah 0.5 (berasal dari nilai 33.3% dibagi 74%). b) Untuk kelompok pangan sumber protein (kacang kacangan dan pangan hewani) dengan total kontribusi energi 17%, diperoleh bobot 2.0 (berasal dari nilai 33.3% dibagi 17%). c) Untuk kelompok pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan total kontribusi energi 6%, diperoleh bobot 5.0 (berasal dari nilai 33.3% dibagi 6%). d) Kelompokpangan lainnya (aneka minuman dan bumbu) dengan kontribusi energi3% akan diperoleh bobot 0.0 yang berasal dari nilai 0% dibagi 3. Bobot0.0 untuk kelompok pangan lainnya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsumsi bumbu dan minuman tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

- Presentase Ketersediaan Pangan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analis adata indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Subsistem keterjangkauan pangan mencakup aspek pengelolaan cadangan pangan. Untuk Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 ditargetkan sebesar 3 Ton sedangkan yang terealisasi sebesar 3,1 Ton (103,33 %). Aspek cadangan pangan menjadi salah satu komponen penting yang dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara (transien) yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan dan pasokan bahan pangan misalnya karena rusaknya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Jumlah cadangan pangan untuk 3 Komoditas yaitu Padi, Ubi Kayu dan Ubi Jalar sebesar 49,143 ton dengan jumlah rata rata cadangan pangan sebesar 16,381 ton. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 untuk jumlah data konsusmsi penduduk perkilogram per kapita per tahun sebesar 93,7

  Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan pangan ditunjang oleh 4 Program dan 6 Kegiatan sebagai berikut :

  1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pan**gan, dengan kegiatan yaitu:
     a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu :
        1. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
  2. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
     a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan yaitu :
        1. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
     b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :
        1. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
     c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, dengan sub kegiatan yaitu :
        1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  3. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**, dengan kegiatan yaitu :
     a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**, dengan kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian

Sasaran 2 (dua) sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2021-2026 ditunjang dengan 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan. Berikut capaian kinerja pada sasaran 2 disajikan dalam tabel :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan	0,32%	-2,23	-696,75%
		Persentase Laju pertumbuhan PDRB sub sektor Hortikultura	0,90%	4,16	462,22%
		Persentase Laju pertumbuhan PDRB sub sektor Perkebunan	8,00%	6,10	76,25%
		Persentase Laju pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan	0,41%	1,93	470,73%
		Persentase Laju pertumbuhan produksi sub sektor tanaman pangan	0,40%	0,02%	5%
		Persentase Laju pertumbuhan produksi sub sektor Hortikultura	2,40%	5,67%	236,25%
		Persentase Laju pertumbuhan produksi sub sektor Perkebunan	2,35%	3,24%	137,87%
		Persentase Laju pertumbuhan populasi sub sektor peternakan	1,50%	-0,01%	-0,67%

Indikator sasaran kinerja 2 ini adalah sebagai berikut :

- Persentase Laju pertumbuhan produksi sub sektor tanaman pangan target tidak tercapai karena kan beberapa hal yaitu :

  - Luasan tanam menurun akibat adanya alih profesi petani

  - Anomali iklim

  - Terdapat puso (gagal panen) 194 Ha di Kecamatan Krayan tengah akibat serangan hama.

  - Anggaran yang diperoleh tidak terfokus dalam peningkatan produksi tanaman pangan sehingga pembiayaan yang digunakan tidak mengungkit pencapaian target.

  - Input anggaran fokus pada prasarana yang daya ungkitnya terhadap peningkatan produksi tidak langsung, sedangkan yang mempunyai daya ungkit secara langsung terhadap peningkatan produksi adalah input sarana pertanian. Diharapkan diakhir tahuan 2024 ini dan pada tahun 2025 peningkatan produksi bisa signifikan.

- Persentase Laju pertumbuhan produksi sub sektor Hortikultura target tercapai dengan baik karena kan :

  - Produksi masih tergantung dengan musim dan siklus tahunan buah.

  - Komoditas yang sangat menonjol peningkatan produksinya yaitu pada produksi cabai yakni laju pertumbuhannya mencapai 80,44% (produksi tahun 2022 sebanyak 650 ton meningkat menjadi 1.172,87 ton pada tahun 2023). Hal ini terjadi karena nilai jual cabai sangat tinggi, permintaan pasar meningkat, sehingga animo petani untuk budidaya cabai meningkat dan produksi juga ikut meningkat. Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan produksi cabai.

  - Sayuran daun juga meningkat dengan laju pertumbuhan mencapai 18,03% (produksi tahun 2022 sebanyak 2.044 ton meningkat menjadi 2.412,49 ton pada tahun 2023). Hal ini terjadi karena nilai jual sayuran daun juga tinggi, permintaan pasar meningkat, dan masa panennya cepat ± 3 minggu hst, sehingga animo petani untuk budidaya sayuran daun meningkat dan produksi juga meningkat. Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan produksi sayuran daun.

  - produksi pisang juga meningkat dengan laju pertmbuhan mencapai 7,10% (produksi tahun 2022 sebanyak 12.188 ton meningkat menjadi 13.053,61 ton pada tahun 2023). Hal ini terjadi karena adanya hasil kegiatan pengembangan pisang pada tahun anggaran 2019 seluas 100 Ha masih berproduksi dengan baik.

- Persentase Laju pertumbuhan produksi sub sektor Perkebunan target tercapai dengan baik karena:

1. Produksi Kelapa sawit masih mendominasi peningkatan laju pertumbuhan produksi perkebunan
2. Ada tambahan Luasan Tanaman menghasilkan ± 2300 Ha dari Perusahaan
3. Harga TBS naik sehingga perusahann dan masyarakat aktif dalam perawata kebun terutama pemberian pupuk.
4. Rata-rata produksi komoditas perkebunan mengalami peningkatan

- Persentase Laju pertumbuhan produksi sub sektor Peternakan target tidak tercapai karena :

  - Khusus di Pulau Sebatik banyak ternak berkurang karena adanya pengeluaran ternak ke Malaysia yang tidak teridentivikasi (pengeluaran secara ilegal) karena tanpa dokumen SKKH (Surat Keterangan Kondisi Hewan).
  - Berdasarkan informasi dari masyarakat Khususnya di Sebuku dan Tulin Onsoi, minat masyarakat berkurang untuk pengembangan ternak sapi karena tingginya kasus pencurian yang susah diatasi. dan adanya kematian ternak yang cukup tinggi akibat keracunan masuk kedalam kebun masyarakat karena cara pemeliharaan ternak sapi secara ekstensif (liar).
  - Banyaknya pemotongan ternak sapi pada acara-acara adat dan hari-hari besar keagamaan tapi tidak dilaporkan.
  - Anggaran yang diperoleh tidak terfokus dalam peningkatan populasi ternak sehingga pembiayaan yang digunakan tidak mengungkit pencapaian target.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian ditunjang oleh 6 Program dan 11 Kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

   a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

      1. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
      2. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

   b. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

      1. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak

   c. Kegiatan Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

      1. Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

   a. Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

      1. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
      2. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
      3. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya.
      4. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

3. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

   a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

      1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

   b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

      1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan Jasa Medik Veteriner

   c. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan yaitu :

      1. Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

4. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**, dengan kegiatan yaitu :

   a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, denga sub kegiatan yaitu :

      1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

5. **Program Perizinan Usaha Pertanian**, dengan kegiatan yaitu :

   a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu:

      1. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian

6. **Program Penyuluhan Pertanian**, dengan kegiatan yaitu :

   a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan yaitu:

      1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran 3 (tiga) sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2021-2026 ditunjang dengan 1(satu) program, 5 (lima) kegiatan. Berikut capaian kinerja pada sasaran 3 disajikan dalam tabel :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Peringkat AKIP	BB	BB	100%

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan ditunjang oleh 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 5 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor
   3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Nunukan

2.2.1. Tugas fungsi dan struktur organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Ketahanan Pangandan Pertanian Kabupaten Nunukan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Orang Sekretaris, 5 (Lima) Orang Kepala Bidang terdiri dari : Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Infrastruktur Pagan Sarana dan Prasarana Pertanian, Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian dan Kepala Bidang Penyuluhan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Pelaksana.

Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
4. Kepala Bidang Infrastruktur Pangan Sarana dan Prasarana Pertanian
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian
7. Kepala Bidang Penyuluhan

2.2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang meliputi ketahanan pangan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan meliputi ketahanan pangan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
b. Perumusan urusan dan kegiatan yang terdiri dari:
    1. Urusan pemerintahan bidang pangan;
    2. Urusan pemerintahan bidang pertanian;
    3. Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

4. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
5. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
6. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
7. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
8. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
9. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
10. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
11. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

c. Pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian;
g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan;
i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian;
j. Perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
k. Pengusulan pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang kepada Bupati melalui Sekda;
l. Pembinaan terhadap UPTD, ASN, dan Non ASN di lingkungan Dinas; dan
m. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

2. Sekretariat

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan DKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;

b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

   1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

   2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;

   3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

   4. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;

   5. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;

   6. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;

   7. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

   8. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan

   9. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. Perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Dinas;

d. Perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;

e. Perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas;

f. Pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;

g. Pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di Lingkungan Dinas;

h. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

i. Pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sedangkan Unsur pembantu Sub Bagian adalah unsur pembantu Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

1). Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    9. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Ketahanan Pangan;
b. Pengoordinasian program yang terdiri dari:
    1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
    2. Program penanganan kerawanan pangan; dan
    3. Program pengawasan keamanan pangan.
c. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Infrastruktur Pangan Sarana dan Prasarana Pertanian

Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian;

b. Pengoordinasian program dan kegiatan yang terdiri dari:

   1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

   2. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;

   3. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain;

   4. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan

   5. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.

c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

   1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;

   2. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota;

   3. Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum; dan

   4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. Penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian

Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian;

b. Pengoordinasian program yang terdiri dari:

   1. Kegiatan peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

   2. Kegiatan pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer;

   3. Kegiatan pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota;

   4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan

   5. Program Perizinan Usaha Pertanian.

c. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan

d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

7. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Penyuluhan;

b. Pengoordinasian program penyuluhan pertanian;

c. Pengoordinasian informasi dan data ketahanan pangan dan pertanian, perkebunan dan peternakan;

d. Pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UPTD merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/impassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan Penyetaraan Jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Pengangkatan dan pelantikan melalui Penyetaraan Jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari Kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan Penyetaraan Jabatan dapat ditetapkan koordinator dan/atau subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional atau oleh Pejabat Pelaksana yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundangundangan yang mengatur tentamg penyesualan sistem kerja. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan koordinator dan/atau subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3.Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangandan Pertanian Kabupaten Nunukan, jumlah total pegawai 229 orang terdiri dari PNS 103 orang, PPPK 8orang, Tenaga Kontrak 118 orang. Dengan jenjang pendidikan S-2 berjumlah 12orang, S-1/D-IV berjumlah 106 orang, D-III berjumlah 21 orang, SMU/sederajat berjumlah 90orang, SMP/sederajat berjumlah 0 orang dan SD 0 orang.

Tabel 2.1

Data Pengawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		
		PNS	PPK	Tenaga Kontrak/Honorer
1.	S-2	12	-	-
2.	S-1/D-IV	58	5	43
3.	D-III	4	2	15
4.	D-II	-	-	-
5.	D-I	-	-	-
6.	SMU/sederajat	29	1	60
7.	SMP/sederajat	-	-	-
8.	SD	-	-	-

Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan					Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya ketersediaan Pangan	Persentase Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	54,22	54,76	55,31	55,86	54,42	70,18		54,42	56,98
		Presentase Ketersediaan Pangan	87,43	87,44	87,45	87,48	87,52	83,93		87,52	87,58
		Persentase Laju pertumbuhan PDRB sub sektor Tanaman pangan	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	-2,23		0,36	0,38
		Persentase Laju pertumbuhan PDRB sub sektor Hortikultura	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	4,16		0,94	0,96
		Persentase Laju pertumbuhan PDRB sub sektor Perkebunan	7,96	7,98	8,00	8,02	8,04	6,10		8,04	8,06
		Persentase Laju pertumbuhan PDRB sub sektor Peternakan	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	1,93		0,45	0,47
2.	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase Laju pertumbuhan produksi sub sektor Tanaman Pangan	11,17	0,10	0,40	0,80	1,20	-0,01		1,20	1,60
		Persentase Laju pertumbuhan produksi sub sektor Hortikultura	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	5,67		2,80	3,00
		Persentase Laju pertumbuhan produksi sub sektor Perkebunan	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45	0,67		2,45	2,50
		Persentase Laju pertumbuhan populasi sub sektor peternakan	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	-0,01		1,70	1,70
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB		BB	BB

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan tersebut diatas, telaah Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2026 serta dinamika permasalahan dilapangan, maka isi-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1. Kondisi ketahanan pangan masih belum mantap dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;

2. Keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;

3. Pengawasan keamanan pangan belum optimal;

4. Belum optimalnya pemantauan distribusi harga dan akses pangan masyarakat;

5. Produktivitas lahan pertanian yang belum dikelola secara optimal;

8. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian yang terbatas dan kurang memadai;

9. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian;

10. Rendahnya nilai tambah produk pertanian;

11. Pencegahan dan pengendalian hama/penyakit pertanian belum optimal;

Selanjutnya, berdasarkan isu strategis yang telah diperoleh, disusunlah strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam perencanaan program dan kegiatan secara terpadu, menyeluruh dan fokus untuk menjawab isu strategis perangkat daerah diatas.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nunukan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2026 adalah langkah pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, Rencana Kerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025–2026 sebagai bahan evaluasi pelaksanaan serta rancangan Awal yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan telah disesuaikan dengan perencanaan kerja yang akan diimplementasikan ke dalam penetapan kerja tahun berikutnya.

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025

KABUPATEN NUNUKAN

NO	RANCANGAN AWAL RENJA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	*2*	*3*		*5*	*6*	*7*	*8*		*10*	*11*	*12*
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**571.802.500**					**1.074.135.320**	
I.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Sebatik Timur**	**Persentase penyediaan infrastruktur lumbung pangangan**	**52,38%**	**159.425.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Sebatik Timur**	**Persentase penyediaan infrastruktur lumbung pangangan**	**52,38%**	**337.489.190**	
1.	**Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sebatik Timur**	**1. Jumlah lumbung yang layak digunakan (renovasi)** **2.Jumlah ketersediaan sarana lumbung**	**0** **1 Unit**	**159.425.000**	**Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sebatik Timur**	**1. Jumlah lumbung yang layak digunakan (renovasi)** **2.Jumlah ketersediaan sarana lumbung**	**0** **1 Unit**	**337.489.190**	

			pangan (Pembangunan)					**pangan (Pembangunan)**			
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Sebatik Timur	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	11 Unit	159.425.000	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Sebatik Timur	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	11 Unit	337.489.190	
II.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Sebatik Timur dan Sembakung Atulai, Nunukan Utara, Sebatik, Nunukan Selatan**	**Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan)**	**87,48%**	**302.500.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Sebatik Timur dan Sembakung Atulai, Nunukan Utara, Sebatik, Nunukan Selatan**	**Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan)**	**87,48%**	**556.521.080**	
2.	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Sebatik Timur dan Sembakung Atulai**	**Jumlah penyediaan dan penyaluran pangan**	**3 Jenis pangan lokal**	**95.000.000**	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Sebatik Timur dan Sembakung Atulai**	**Jumlah penyediaan dan penyaluran pangan**	**3 Jenis pangan lokal**	**176.690.480**	

	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Jumlah informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	20.000.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Jumlah informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	51.970.480	
2.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sebatik Timur dan Sembakung Atulai	Jumlah Pangan sumber daya lokal yang tersedia	1 Laporan	55.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sebatik Timur dan Sembakung Atulai	Jumlah Pangan sumber daya lokal yang tersedia	1 Laporan	59.827.000	
	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan		Jumlah Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 Dokumen	20.000.000	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	0	Jumlah Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 Dokumen	64.893.000	
3.	**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Nunukan**	**Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**12,6 Ton**	**57.500.000**	**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Nunukan**	**Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**12,6 Ton**	**228.411.000**	
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	12,6 Ton	57.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	12,6 Ton	228.411.000	
4.	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Nunukan Utara, Sebatik, Nunukan Selatan**	**Jumlah pemanfaatan lahan pekarangan**	**1 KWT**	**150.000.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Nunukan Utara, Sebatik, Nunukan Selatan**	**Jumlah pemanfaatan lahan pekarangan**	**1 KWT**	**151.419.600**	

4.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Nunukan Utara, Sebatik, Nunukan Selatan	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Nunukan Utara, Sebatik, Nunukan Selatan	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	151.419.600	
III.	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Sebatik dan Seimenggaris**	**Persentase daerah rawan pangan yang ditangani**	**44,60%**	**57.500.000**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Sebatik dan Seimenggaris**	**Persentase daerah rawan pangan yang ditangani**	**44,60%**	**83.338.000**	
5.	**Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Sebatik dan Seimenggaris**	**Cakupan daerah rawan pangan yang ditangani**	**5 Kec.**	**57.500.000**	**Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Sebatik dan Seimenggaris**	**Cakupan daerah rawan pangan yang ditangani**	**5 Kec.**	**83.338.000**	
5.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sebatik dan Seimenggaris	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	57.500.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sebatik dan Seimenggaris	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83.338.000	

IV.	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, , Sebatik Timur, Sebatik Barat, Tulin Onsoi, lumbis dan Krayan**	**Persentase Pengawasan keamanan pangan segar**	**20%**	**52.377.500**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, , Sebatik Timur, Sebatik Barat, Tulin Onsoi, lumbis dan Krayan**	**Persentase Pengawasan keamanan pangan segar**	**20,00%**	**96.787.050**	
6.	**Kegatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, , Sebatik Timur, Sebatik Barat, Tulin Onsoi, lumbis dan Krayan**	**Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar**	**5 Lokasi**	**52.377.500**	**Kegatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, , Sebatik Timur, Sebatik Barat, Tulin Onsoi, lumbis dan Krayan**	**Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar**	**5 Lokasi**	**96.787.050**	
6.	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebuku, Krayan (Nanas)	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	26.377.500	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebuku, Krayan (Nanas)	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	29.780.800	

7.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Timur, Sebatik Barat, Tulin Onsoi, Lumbis dan Krayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	26.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Timur, Sebatik Barat, Tulin Onsoi, Lumbis dan Krayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	67.006.250	
B.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**5.381.931.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**2.682.775.195,00**	
V.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Sembakung dan Lumbis Sei Fatimah Sebatik Timur dan Sebatik Utara Pulau Sebatik Sebatik Tengah**	**1. Prosentase laju pertumbuhan Produktivitas pertanian tanaman pangan: - Padi Adan Organik - Padi - Jagung - Ubi Kayu 2. Prosentase laju pertumbuhan Produktivitas pertanian tanaman hortikultura :**	**0,09 % 0,10 % 1,28 % 1,28 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 10 % 15 %**	**1.972.680.000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Sembakung dan Lumbis Sei Fatimah Sebatik Timur dan Sebatik Utara Pulau Sebatik Sebatik Tengah**	**1. Prosentase laju pertumbuhan Produktivitas pertanian tanaman pangan: - Padi Adan Organik - Padi - Jagung - Ubi Kayu 2. Prosentase laju pertumbuhan Produktivitas pertanian tanaman hortikultura :**	**0,09 % 0,10 % 1,28 % 1,28 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 10 % 15 %**	**714.000.000**	

			- Durian - Pisang - Nanas Krayan - Cabai - Semangka/Melon - Sayuran daun 3. Prosentase laju pertumbuhan Produktivitas pertanian tanaman perkebunan : - Kelapa Dalam - Kopi Krayan - Kakao 4. Persentase ketersediaan sarana peternakan	2 % 1,1 %				- Durian - Pisang - Nanas Krayan - Cabai - Semangka/Melon - Sayuran daun 3. Prosentase laju pertumbuhan Produktivitas pertanian tanaman perkebunan : - Kelapa Dalam - Kopi Krayan - Kakao 4. Persentase ketersediaan sarana peternakan	2 % 1,1 %		
7.	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Semua kecamatan kecuali W4'- NNK, Krayan dan Krayan Barat	1. Cakupan wilayah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi2. Jumlah ketersediaan sarana pertanian (Alat	13 Kec. 254 Unit	1.484.996.000	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Semua kecamatan kecuali W4'- NNK, Krayan dan Krayan Barat	1. Cakupan wilayah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi2. Jumlah ketersediaan sarana pertanian (Alat	13 Kec. 254 Unit	600.000.000	

			dan mesin pertanian)					**dan mesin pertanian)**			
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi		Jumlah pengawasan pengunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	1 Laporan	484.996.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi		Jumlah pengawasan pengunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	1 Laporan	-	
8.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Semua kecamatan kecuali W4 '- NNK, Krayan dan Krayan Barat	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1 Laporan	1.000.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Semua kecamatan kecuali W4 '- NNK, Krayan dan Krayan Barat	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1 Laporan	600.000.000	
8.	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Sei Fatimah**	**1. Jumlah Pengelolaan Demplot Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan**	**1 Unit**	**137.684.000**	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Sei Fatimah**	**1. Jumlah Pengelolaan Demplot Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan**	**1 Unit**	**114.000.000**	
		P. Nunukan, P. Sebatik, Tulin Onsoi	**2. Jumlah kelahiran ternak melalui Inseminasi Buatan (IB)**	**92 Ekor**		**0**	**P. Nunukan, P. Sebatik, Tulin Onsoi**	**2. Jumlah kelahiran ternak melalui Inseminasi Buatan (IB)**	**92 Ekor**		

9.	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Sei Fatimah	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 VUB	57.684.000	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Sei Fatimah	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 VUB	39.000.000	
10.	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	P. Nunukan, P. Sebatik, Tulin Onsoi	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman	1 Dokumen	80.000.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	P. Nunukan, P. Sebatik, Tulin Onsoi	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman	1 Dokumen	75.000.000	
10.	**Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Pulau Sebatik, Krayan, Lumbis HuluSebatik Tengah**	**Jumlah pengadaan bibit ternak**	**30 Ekor**	**350.000.000**	**Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Pulau Sebatik, Krayan, Lumbis HuluSebatik Tengah**	**Jumlah pengadaan bibit ternak**	**30 Ekor**	**-**	
12.	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pulau Sebatik, Krayan , Lumbis Hulu	Jumlah benih / bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain	30 Ekor	350.000.000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pulau Sebatik, Krayan , Lumbis Hulu	Jumlah benih / bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain	30 Ekor	-	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Krayan, P.NNK, P.Sebatik & W3**	**1. Persentase laju pertumbuhan ketersediaan Prasarana Pertanian** **2. Persentase**	**2 %** **0**	**1.845.000.000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Krayan, P.NNK, P.Sebatik & W3**	**1. Persentase laju pertumbuhan ketersediaan Prasarana Pertanian** **2. Persentase**	**2 %** **0**	**600.000.000**	

			ketersediaan Prasarana Peternakan					**ketersediaan Prasarana Peternakan**			
11.	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Krayan, P.NNK, P.Sebatik & W3**	**Jumlah prasarana pertanian yang dibangun**	**23 Unit**	**1.845.000.000**	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Krayan, P.NNK, P.Sebatik & W3**	**Jumlah prasarana pertanian yang dibangun**	**23 Unit**	**600.000.000**	
14.	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Krayan P.NNK, P.Sebatik & W3 NNKS, S.Barat, S.Timur	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8 Unit	875.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Krayan P.NNK, P.Sebatik & W3 NNKS, S.Barat, S.Timur	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8 Unit	250.000.000	
15.	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	P. NNK dan P. Sebatik	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8 Unit	350.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	P. NNK dan P. Sebatik	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8 Unit	350.000.000	
16.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Sembakung, Sebatik, Sebuku dan Krayan	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	600.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Sembakung, Sebatik, Sebuku dan Krayan	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	-	
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	P.NNK, P.Sebatik	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun,	1 Unit	20.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	P.NNK, P.Sebatik	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun,	1 Unit	-	

			direhabilitasi dan dipelihara					direhabilitasi dan dipelihara			
VI.	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Seimenggaris**	**1. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 2. Jumlah pelaku usaha yang memilki NKV (Nomor Control Veteriner)**	**5 % 1 Pelaku Usaha Peternakan**	**425.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Seimenggaris**	**1. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 2. Jumlah pelaku usaha yang memilki NKV (Nomor Control Veteriner)**	**5 % 1 Pelaku Usaha Peternakan**	**377.000.000**	
12.	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Seimenggaris**	**Cakupan pelayanan kesehatan hewan**	**12 Kec.**	**180.246.917**	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Seimenggaris**	**Cakupan pelayanan kesehatan hewan**	**12 Kec.**	**169.000.000**	
17.	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Seimenggaris	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan	1 Laporan	180.246.917	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Krayan, Kec. Tulin	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan	1 Laporan	169.000.000	

			zoonosis				Onsoi, Kec. Seimenggaris	zoonosis			
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nunukan**	**Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner**	**1 Laporan**	**93.181.445**	**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner**	**1 Laporan**	**75.000.000**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Nunukan	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	1 Laporan	93.181.445	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Nunukan	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	1 Laporan	75.000.000	
13.	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	P. Nunukan, P. Sebatik dan Tulin Onsoi	**1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan NKV (Nomor Control Veteriner)2. jumlah pelaku usaha peternakan yang dibina**	**5 Pelaku Usaha Peternakan 180 Org**	**151.571.638**	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**P. Nunukan, P. Sebatik dan Tulin Onsoi**	**1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan NKV (Nomor Control Veteriner)2. jumlah pelaku usaha peternakan yang dibina**	**5 Pelaku Usaha Peternakan 180 Org**	**133.000.000**	
18.	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	P. Nunukan, P. Sebatik dan Tulin Onsoi	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	1 Laporan	151.571.638	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	P. Nunukan, P. Sebatik dan Tulin Onsoi	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	1 Laporan	133.000.000	

VII.	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Seimenggaris, Kec. Lumbis, Tulin Onsoi, Sebuku, Sembakung**	**Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertaniannya**	**90%**	**356.476.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Seimenggaris, Kec. Lumbis, Tulin Onsoi, Sebuku, Sembakung**	**Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertaniannya**	**90,00%**	**300.000.000**	
13.	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Seimenggaris, Kec. Lumbis, Tulin Onsoi, Sebuku, Sembakung**	**luasan pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian di Kabupaten Nunukan**	**11000 Ha**	**356.476.000**	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Seimenggaris, Kec. Lumbis, Tulin Onsoi, Sebuku, Sembakung**	**luasan pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian di Kabupaten Nunukan**	**11000 Ha**	**300.000.000**	
19.	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Seimenggaris, Kec. Lumbis, Tulin Onsoi, Sebuku, Sembakung	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	11000 Ha	356.476.000	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	P. Nunukan, P. Sebatik, Kec. Seimenggaris, Kec. Lumbis, Tulin Onsoi,	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	11000 Ha	300.000.000	

			yang dikendalikan				Sebuku, Sembakung	yang dikendalikan			
IX.	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Sembakung dan Sebuku**	**Persentase izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya secara berkala**	**17,86%**	**133.515.000**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Sembakung dan Sebuku**	**Persentase izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya secara berkala**	**17,86%**	**113.515.000**	
15.	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota**	**Sembakung dan Sebuku**	**Jumlah izin usaha pertanian yang diawasi**	**13 Unit Usaha Pertanian**	**48.515.000**	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota**	**Sembakung dan Sebuku**	**Jumlah izin usaha pertanian yang diawasi**	**13 Unit Usaha Pertanian**	**48.515.000**	
23.	Sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Sembakung dan Sebuku	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	13 Laporan	48.515.000	Sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Sembakung dan Sebuku	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	13 Laporan	48.515.000	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan / Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		**Jumlah penangkar yang diawasi**	**3 Penangkar**	**85.000.000**	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan / Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**0**	**Jumlah penangkar yang diawasi**	**3 Penangkar**	**65.000.000**	

	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan zin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan		Jumlah izin usaha produksi benih / bibit ternak dan pakan yang diawasi	1 Laporan	85.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan zin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan	0	Jumlah izin usaha produksi benih / bibit ternak dan pakan yang diawasi	1 Laporan	65.000.000	
VIII.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**P.NNK, P.Sebatik, W3, dan Krayan**	**1. Rasio peningkatan kapasitas Poktan** **2. Rasio peningkatan kapasitas BPP dan PPL**	**8,05%** **100 %**	**649.260.000**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**P.NNK, P.Sebatik, W3, dan Krayan**	**1. Rasio peningkatan kapasitas Poktan** **2. Rasio peningkatan kapasitas BPP dan PPL**	**8,05%** **100 %**	**578.260.195**	
14.	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**P.NNK, P.Sebatik, W3, dan Krayan**	**1. Jumlah Peningkatan Kemampuan Poktan** **2. Jumlah peningkatan kapasitas BPP** **3. Jumlah peningkatan kapasitas PPL**	**23 Poktan** **10 BPP** **0 Org**	**649.260.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**P.NNK, P.Sebatik, W3, dan Krayan**	**1. Jumlah Peningkatan Kemampuan Poktan** **2. Jumlah peningkatan kapasitas BPP** **3. Jumlah peningkatan kapasitas PPL**	**23 Poktan** **10 BPP** **0 Org**	**578.260.195**	

20.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Krayan, Sebuku, Seimenggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Barat, Sebatik, Sembakung, Lumbis	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Unit	270.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Krayan, Sebuku, Seimenggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Barat, Sebatik, Sembakung, Lumbis	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Unit	270.000.000	
21.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kec. Nunukan Selatan, Sebatik dan Sebatik Barat	Jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	23 Unit	208.260.195	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kec. Nunukan Selatan, Sebatik dan Sebatik Barat	Jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	23 Unit	208.260.195	
22.	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Nunukan, Sebatik dan Sebatik Barat	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	20 Unit	70.999.805	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Nunukan, Sebatik dan Sebatik Barat	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	20 Unit	-	
22.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Nunukan, Sebatik dan Sebatik Barat	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	3 Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat	Nunukan, Sebatik dan Sebatik Barat	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	3 Unit	100.000.000	

						Kabupaten/Kota					
C.	**SEMUA BIDANG URUSAN**				**16.275.500.000**	**SEMUA BIDANG URUSAN**	**0**	**0**	**0,00%**	**14.632.216.383**	
X.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Nunukan**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**16.275.500.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Nunukan**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100,00%**	**14.632.216.383**	
16.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nunukan**	**Jumlah dokumen SAKIP yang tersedia**	**12 Dokumen**	**137.229.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nunukan**	**Jumlah dokumen SAKIP yang tersedia**	**12 Dokumen**	**137.229.000**	
	Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	30.000.000	
24.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil	4 Laporan	57.229.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil	4 Laporan	57.229.000	

			koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			
25.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	50.000.000	
17.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nunukan**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan penghasilan aparatur**	**14 Bulan**	**13.485.605.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nunukan**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan penghasilan aparatur**	**14 Bulan**	**12.397.971.517**	
26.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nunukan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	196 Org	13.485.605.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nunukan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	196 Org	12.397.971.516,82	
18.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nunukan**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional umum perkantoran**	**4 Paket**	**226.954.760**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nunukan**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional umum perkantoran**	**4 Paket**	**139.651.026**	
27.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.762.450	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	14.458.716,18	**14.458.716,18**

28.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nunukan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	20.856.700	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nunukan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	20.856.700	
29.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nunukan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	4.335.610	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nunukan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	4.335.610	
30.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000	
19.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nunukan**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional penunjang perkantoran**	**12 Bulan**	**2.202.711.240**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nunukan**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional penunjang perkantoran**	**12 Bulan**	**1.919.364.840**	
31.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	200.455.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	195.000.000	
32.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	8.678.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	8.500.000	

33.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1.993.578.240	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1.715.864.840	
20.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nunukan**	**Jumlah pemeliharaan fasilitas perkantoran**	**6 Unit**	**223.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nunukan**	**Jumlah pemeliharaan fasilitas perkantoran**	**6 Unit**	**38.000.000**	
34.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	38.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	38.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nunukan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nunukan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Unit	0	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Nunukan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	180.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Nunukan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	-	
	Total				**22.229.233.500**			**Total**		**18.389.126.898**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program dari masyarakat sampai dengan disusunnya RKPD atau Renja tidak terlepas dari regulasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara teknis normatif melalui Musrenbang desa dan kecamatan, berlanjut ke Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten (Forum SKPD). Pada tahapan Musrenbang Desa/kelurahan dan kecamatan secara intensif telah melibatkan masyarakat secara partisipatif, selanjutnya hasil Musrenbang kecamatan di bawa ke Musrenbang Kabupaten (Forum SKPD) untuk dipadukan dengan Kebutuhan/kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini OPD. Selanjutnya dirumuskan dalam RKPD dan Renja OPD. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan yang ditujukan langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan secara spesifik tersaji dalam tabel 2.4.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN PENTING (PENGUSUL)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				
1.	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**				
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	KWT Sari Mukti Ds. Srinanti	- Pengadaan dan pemeliharaan alat Cultivator	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan
		Ds. Lapri	- Pengadaan Traktor	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah II Pulau Sebatik
		Ds. Lapri	- Pengadaan Penggiling Padi	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah II Pulau Sebatik
		RT. 16 Nunukan Tengah	- Pengadaan Alat dan Mesin Pengolah Tepung Singkong	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah I Pulau Nunukan
		RT. 16 Nunukan Tengah	- Pengadaan Traktor	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah I Pulau Nunukan
		RT. 16 Nunukan Tengah	- Pengadaan Penggiling Padi	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah I Pulau Nunukan
		Ds. Tau Lumbis	- Penyediaan alat dan mesin pertanian	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kec. Lumbis Hulu
		Jl. Sultan Hasanuddin, Dusun Lalesalo RT.03 Sebatik Utara	- Pengadaan alat dan mesin pertanian	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kec. Sebatik Utara
		Ds. Binalawan Kec. Sebatik Barat	- Bantuan Handtraktor	Disesuaikan	Pokir a.n. Andre Pratama
		Kec. Nunukan	- Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian	3 Unit	Pokir a.n. Adama

		Kec. Nunukan Selatan	- Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian	3 Unit	Pokir a.n. Adama
		Ds. Lapri Kec. Sebatik Utara	- Pengadaan Pompanisasi Persawahan	Disesuaikan	Pokir a.n. Hamsing, S.Pi
2.	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Poktan Sei Limau Sebatik Tengah	- Pengadaan pestisida	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah II Pulau Sebatik
		RT. 16 Nunukan Tengah	- Pengadaan pestisida	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah I Pulau Nunukan
		Tanjung Harapan Nunukan Selatan	- Pengadaan saprodi	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kecamatan Nunukan Selatan
		Poktan Sei Limau Sebatik Tengah	- Pengawasan dan Pengadaan pupuk bersubsidi	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah II Pulau Sebatik
		Sungai Limau	- Pengawasan dan Pengadaan pupuk bersubsidi	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kec. Sebatik Tengah
		RT. 16 Nunukan Tengah	- Pengawasan dan Pengadaan pupuk bersubsidi	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah I Pulau Nunukan
		Kec. Sembakung	- Pengadaan saprodi	Disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		Ds. Binusan	- Pengadaan saprodi	Disesuaikan	Pokir a.n. Joni Sabindo, SE
		Kelurahan Nunukan Tengah	- Pengadaan saprodi	Disesuaikan	Pokir a.n. Joni Sabindo, SE
		Kelurahan Nunukan Barat	- Pengadaan saprodi	Disesuaikan	Pokir a.n. Joni Sabindo, SE
		Ds. Pagaluyon kec. Sembakung Atulai	- Pengadaan pupuk bersubsidi	Disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		RT. 15, RT.16, RT.17, RT.19 Kel.Nunukan Tengah	- Pengadaan saprodi	4 Paket	Pokir a.n. Joni Sabindo, SE
		Ds. Pembeliangan Kec. Sebuku	- Pengadaan saprodi	Disesuaikan	Pokir a.n. Tri Wahyuni
		Kec. Nunukan	- Pengadaan Sarlong/Sarnet	Disesuaikan	Pokir. A.n. Adama
		Kec. Nunukan Selatan	- Pengadaan Sarlong/Sarnet	Disesuaikan	Pokir. A.n. Adama
		Desa Pagar, Kec. Sembakung	- Penyediaan Bibit Kelapa Sawit	Disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		Desa Labuk, Kec. Sembakung	- Penyediaan Bibit Kelapa Sawit	disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		RT.2 Ds. Pagaluyon Kec. Sembakung Atulai	- Penyediaan Bibit Kelapa Sawit	Disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos

		Ds. Mambulu Kec. Sembakung Atulai	- Penyediaan Bibit Kelapa Sawit	Disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		Ds. Pagaluyon kec. Sembakung Atulai	- Pengadaan bibit buah unggul	Disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		Kec. Nunukan	- Pengadaan bibit tanaman unggul	Disesuaikan	Pokir a.n. Adama
		Kec. Nunukan Selatan	- Pengadaan bibit tanaman unggul	Disesuaikan	Pokir a.n. Adama
		Ds. Lapri Kec. Sebatik Utara	- Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Disesuaikan	Pokir a.n. Hamsing, S.Pi
		Ds. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur	- Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Disesuaikan	Pokir a.n. Hamsing, S.Pi
		Ds. Limau	- Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Disesuaikan	Pokir a.n. Hamsing, S.Pi
		Ds. Lapri Kec. Sebatik Utara	- Pengadaan benih padi unggul		
2.	**Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**				
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Ds. Seberang Sebatik Utara	- Pengadaan bibit ternak	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kec. Sebatik Utara
		Jl. Pembangunan RT.01 Ds. Sasibu Kec. Lumbis	- Pengadaan bibit ternak	Disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		RT.15, RT.16, RT.17 dan RT.19 Kel.Nunukan Tengah	- Pengadaan bibit ternak kerbau	Disesuaikan	Pokir a.n. Joni Sabindo, SE
II.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				

	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian				
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Desa Labuk Kec. Sembakung	Percetakan Sawah	Disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		Ds. Kalampising, Kec. Lumbis	Pembukaan Lahan	Disesuaikan	Pokir a.n. Hendrawan, S.Pd
3.	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**				
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani	Ds. Lapri Kec. Sebatik Utara	Rehabilitasi saluran irigasi persawahan	disesuaikan	Pokir. A.n. Hamsing, S.Pi
		Gang H.Busra Ds.Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat	Pembangunan saluran irigasi	disesuaikan	Pokir. A.n. Hamsing, S.Pi
		Krayan tengah	Percetakan sawah	30 Ha	Hasil Musrenbang Wilayah Krayan
4.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Gunung Kanji, Ds. Labang, Lumbis Pansiangan	- Pembangunan JUT	disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan Daerah Aliran Sungai
		Gunung Kanji, Ds. Labang, Lumbis	- Rehabilitasi JUT	disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan Daerah Aliran Sungai
		Gunung Kanji, Ds. Labang, Lumbis	- Pemeliharaan JUT	disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan Daerah Aliran Sungai
		Kekayap	- Pembangunan JUT	disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan
		Jl. P. Antasari	- Perbaikan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan
		Jl. Sultan Agung	- Perbaikan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan
		Jl. Teuku Umar	- Perbaikan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan

		Jl. Dewi Sartika	- Perbaikan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan
		Jl. Imam Bonjol	- Perbaikan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan
		Jl. Cut Nyak Dien	- Perbaikan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan
		Jl. Teuku Umar Ds. Tabur Lestari	- Pembangunan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan
		Jl. Cut Nyak Dien Ds. Tabur Lestari	- Pembangunan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah III Daratan Kalimantan
		Jl. Sianak RT. 05 Ds. Bambangan	- Pembangunan JUT	4 Km	Hasil Musrenbang Wilayah II Pulau Sebatik
		RT. 03	- Pembangunan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah II Pulau Sebatik
		RT. 03	- Rehabilitasi JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah II Pulau Sebatik
		RT. 03	- Pemeliharaan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah II Pulau Sebatik
		RT. 16 Nunukan Tengah	- Pembangunan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah I Pulau Nunukan
		RT. 16 Nunukan Tengah	- Rehabilitasi JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah I Pulau Nunukan
		RT. 16 Nunukan Tengah	- Pemeliharaan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Wilayah I Pulau Nunukan
		Ds. Tuntulibing, Kc. Lumbis Hulu	- Pembangunan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kec. Lumbis Hulu
		Ds. Pa'loo Kec. Lumbis	- Pembangunan JUT Perkebunan sawit	5 Km	Hasil Musrenbang Kec. Lumbis
		Ds. Pa'loo Kec. Lumbis	- Rehabilitasi JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kec. Lumbis
		Ds. Pa'loo Kec. Lumbis	- Pemeliharaan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kec. Lumbis
		Gunung Kanji, Ds. Labang ke PLBN Kec. Lumbis Pansiangan	- Pembangunan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kec. Lumbis Pasiangan

		Gunung Kanji, Ds. Labang ke PLBN Kec. Lumbis Pansiangan	- Rehabilitasi JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kec. Lumbis Pasiangan
		Gunung Kanji, Ds. Labang ke PLBN Kec. Lumbis Pansiangan	- Pemeliharaan JUT	Disesuaikan	Hasil Musrenbang Kec. Lumbis Pasiangan
		Desa Kekayap	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		Desa Labuk, Kec. Sembakung	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		RT. 02 Km.4 Ds. Kunyit Kec. Sebuku	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Amrin
		RT. 02 Ds. Harapan Kec. Sebuku	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Amrin
		RT. 03 Gembelia Ds. Pembeliangan Kec. Sebuku	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Amrin
		RT. 02 Km.4 Ds. Kunyit Kec. Sebuku	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Amrin
		Ds. Sibalu Kec. Lumbis Hulu	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Hendarawan, S.Pd
		Ds. Sumalumung Kec. Lumbis	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Hendarawan, S.Pd
		Ds. Liuk Bulu menuju Binangun Kec. Sembakung Atulai	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		Jl. Pongtiku RT.17 Kampung Tator Kel.Nunukan tengah	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Joni Sabindo, SE
		Ds. Pagaluyon Kec.Sembakung Atulai	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		Ds. Mambulu kec. Sembakung Atulai	Perbaikan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Lewi, S.Sos
		Ds. Tanjung Hilir Kec. Lumbis	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Hendarawan, S.Pd
		Ds. Binusan Kec. Nunukan	Pembukaan akses JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Joni Sabindo, SE
		Ds. Kalampising Kec. Lumbis	Peningkatan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Hendarawan, S.Pd
		RT.10 Sebakis, Ds. Pembeliangan Kec. Sebuku	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Amrin
		Jl. Area Jang Asher Ds. Binusan Dalam	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Robinson Totong
		RT. 10 Ds. Binusan Dalam	Pembangunan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Jainuddin, SE

		Ds. Lapri Kec. Sebatik Utara	Peningkatan JUT	Disesuaikan	Pokir a.n. Hamsing, S.Pi
		Ds. Setabu Kec. Sebatik Barat	Peningkatan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Hamsing, S.Pi
		Ds. Tebaring	Peningkatan JUT	disesuaikan	Pokir a.n. Hamsing, S.Pi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Nunukan akan selalu terkait dan terikat dengan visi dan misi pembangunan pertanian secara nasional. Oleh karena itu Renstra Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan dikaitkan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan RPJMD Kabupaten Nunukan. Pengaitan ini dilakukan untuk mencari kesejajaran visi dan misi yang diperbandingkan.

Disamping penjajaran tersebut di atas, dilakukan juga telaahan secara khusus terhadap Renstra Kementerian Pertanian. Telaahan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari kaitan secara langsung antara program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dengan rencana pembangunan pertanian secara nasional. Terdapat 4 misi dalam Renstra Kementerian Pertanian, tetapi yang secara langsung terkait dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Nunukan hanya 3 misi, yaitu : Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Mewujudkan Sistem Bioindustri Pertanian Berkelanjutan dan Mewujudkan Kesejahteraan Petani. Sedangkan 1 misi lainnya, yaitu Reformasi Birokrasi, lebih berhubungan dengan kondisi internal Kementerian Pertanian, meskipun secara tekstual juga menjadi harapan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .

Oleh karena itu, program pembangunan daerah yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan tidak terlepas dari Program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Adapun telaahan terhadap kebijakan nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan berdasarkan pada Renstra Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh OPD mendasar pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan periode 2021-2026 yaitu :

"***MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA***",

Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan berupaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui misi III yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal.

Tujuan pembangunan bidang pertanian merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pemerintah daerah yang diprioritaskan pada peningkatan produksi perkebunan, tanaman Pangan, hortikultura dan peningkatan populasi ternak, serta adanya ketersediaan pangan.

Adapun tujuan Perangkat Daerah yang ingin dicapai dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Pariwisata", sehingga tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, ketersediaan pangan, konsumsi dan keamanan pangan dan perkebunan) juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian", sehingga sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama
2. Meningkatnya produksi pertanian
3. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan perlu melibatkan berbagai *stakeholder*. Wujud keterlibatan para *stakeholder* dimaksud adalah melalui pelaksanaan beberapa program dan kegiatan disamping keterlibatan lintas OPD lain. Pelaksanaan program lintas OPD ini sangat memperhatikan keterkaitan tugas pokok, fungsi serta wewenang dari instansi tersebut.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Nunukan akan selalu terikat dengan visi dan misi pembangunan pertanian secara nasional. Oleh karena itu Renja Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan dikaitkan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036, RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Pengaitan ini dilakukan untuk mencari kesejajaran visi dan misi yang diperbandingkan. Oleh karena itu, program pembangunan daerah yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan tidak terlepas dari Program pembangunan daerah.

Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan pada Tahun 2024 ini, telah menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 serta menyesuaikan dengan peraturan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan sebagimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar sasaran kinerja yang akan dilaksanakan bisa selaras dengan perencanaan daerah Kabupaten Nunukan. Renja Tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan terfokus pada target indikator program dan kegiatan.

4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun 2024 disamping mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang /Forum SKPD juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

b. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
c. Peningkatan kesejahteraan petani
c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
b. Meningkatkan ketahanan dan diversifikasi pangan;
c. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) berkelanjutan;
d. Meningkatkan sarana prasarana pertanian untuk mendukung pengembangan agribisnis;
e. Membangun sistem informasi pertanian yang akurat dan akuntabel;
f. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk mendukung daya saing produk pertanian.

Selanjutnya penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan pada Tahun Anggaran 2024 juga tetap menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan

b. **Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. **Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi**, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan yaitu :

a. **Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

B. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

a. **Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
   2. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

b. **Kegiatan** Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

a. **Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian**, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
   2. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
   3. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

a. **Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. **Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan Jasa Medik Veteriner

c. **Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**, dengan sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan yaitu :

a. **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan yaitu :

a. **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan dengan sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan

6. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan yaitu :

a. **Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**, dengan sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.
3. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber pendanaan dari Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan berasal dari APBD Kabupaten Nunukan. Untuk lebih jelasnya uraian rencana kerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada uraian rencana program, kegiatan, indiaktor kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025 pada lampiran Tabel 2.5

Tabel 2.5

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB. NUNUKAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				**26.502.756.955,00**				**24.055.593.491,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.509.307.340,00**				**762.705.500,00**
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**1.509.307.340,00**				**762.705.500,00**
1,	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah***	**100%**	**100%**	**46.976.750,00**			**100%**	**200.000.000,00**
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianyan Laporan Capaian Kinerrja (LKPJ, LKJIP, SPIP dan LPPD)*	-	4 Dokumen	46.976.750,00			-	200.000.000,00
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	46.976.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
2,	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	***Persentase penyediaan infrastruktur lumbung pangan***	**57.14 %**	**57.14 %**	**0,00**			**57.14 %**	**177.828.000,00**
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*1. Jumlah lumbung yang layak digunakan (renovasi)* *2.Jumlah ketersediaan sarana lumbung pangan (Pembangunan)*	-	0 unit 1 unit	0,00			-	177.828.000,00
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya								
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		12 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		177.828.000,00
3,	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan pangan)***	**87.52 %**	**87.52 %**	**1.165.089.100,00**			**87.52 %**	**275.000.000,00**

	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	-	1 Laporan	425.895.200,00			-	67.500.000,00
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		1 Laporan	105.107.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27.500.000,00
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota								
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota		2 Laporan	68.062.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan								
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan		1 Dokumen	252.726.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*	-	14,0 ton	603.662.600,00			-	57.500.000,00
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								

			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		14 Ton	603.662.600,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		57.500.000,00
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	-	1 Laporan	135.531.300,00			-	150.000.000,00
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Laporan	135.531.300,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
4,	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase daerah rentan rawan pangan yang ditangani***	**45,04 persen**	**45,04 persen**	**178.056.240,00**			**45,04 %**	**57.500.000,00**

	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*cakupan daerah rentan rawan pangan yang ditangani Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/KOta*	-	5 kecamatan 1 Dokumen	178.056.240,00			-	57.500.000,00
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	178.056.240,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		57.500.000,00
5,	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase pengawasan keamanan pangan segar***	**20 Persen**	**20 Persen**	**119.185.250,00**			**20%**	**52.377.500,00**
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar*	-	5 lokasi	119.185.250,00			-	52.377.500,00
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		5 Dokumen	32.191.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26.377.500,00

	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		0 Dokumen	86.994.250,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26.000.000,00
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**24.993.449.615,00**				**23.292.887.991,00**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**24.993.449.615,00**				**23.292.887.991,00**

1,	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah***	**100%**	**100%**	**19.744.362.090,00**			**100%**	**17.076.200.000,00**
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianyan Laporan Capaian Kinerrja (LKPJ, LKJIP, SPIP dan LPPD)*	-	4 Dokumen	301.525.750,00			-	500.000.000,00
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	217.136.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	84.389.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	16.786.572.320,00			-	13.485.605.000,00
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		196 Orang/bulan	16.786.572.320,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.485.605.000,00

							Kel/Desa			
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	-	1 Paket	466.186.300,00			-	406.000.000,00
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	270.360.010,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72.500.000,00
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	75.006.290,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000,00
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.500.000,00
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		13 Laporan	120.820.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00

	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	-	12 Laporan	2.126.825.720,00			-	2.273.578.240,00
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	195.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		230.000.000,00
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	31.780.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.900.045.520,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.993.578.240,00
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	-	6 unit	63.252.000,00			-	411.016.760,00
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 Unit	63.252.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		131.016.760,00
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		280.000.000,00
2,	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**711.303.640,00**			**-**	**2.720.848.000,00**
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	-	600.000.000,00			-	2.223.164.000,00
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		0 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		223.164.000,00

	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1 Laporan	600.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000.000,00
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	111.303.640,00			-	147.684.000,00
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman								
			0		0 0	51.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90.000.000,00
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan								
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		1 laporan	59.403.640,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		57.684.000,00
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	0,00			-	350.000.000,00
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		30 Dosis	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00

							Kel/Desa			
3,	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**2.099.976.000,00**			**-**	**1.825.000.000,00**
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	0,00			-	0,00
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota								
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola		0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian								
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Dam Parit (Jaringan Irigasi) yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara Jumlah prasarana pertanian yang dibangun*	-	undefined undefined 24 unit	2.099.976.000,00			-	1.825.000.000,00

	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani								
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		7 Unit	349.980.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit								
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		7 Unit	250.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		875.000.000,00
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya								
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya								
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	1.499.996.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
4,	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	-	-	-	**524.622.635,00**			-	**502.106.000,00**

	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	197.951.700,00			-	193.016.987,00
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		1 Laporan	197.951.700,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		193.016.987,00
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	137.510.000,00			-	131.983.208,00
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner								
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		1 Laporan	137.510.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		131.983.208,00
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	189.160.935,00			-	177.105.805,00
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan								

			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi		5 Unit Usaha	189.160.935,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		177.105.805,00
5,	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase Luas Wilayah Yang Terkendali Bencana Pertaniannya***	**90 %**	**90 %**	**376.544.500,00**			**90 %**	**397.626.000,00**
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian di Kabupaten Nunukan*	-	11000 ha	376.544.500,00			-	397.626.000,00
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								

			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		11000 Ha	376.544.500,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		397.626.000,00

							Sebatik Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa			
6,	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase Izin Usaha Bidang Pertanian Yang Diawasi***	**17,86 %**	**17,86 %**	**185.305.000,00**			**17, 86 %**	**126.095.000,00**
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terbina dan Terawasinya Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian*	-	18 laporan	85.335.000,00			-	36.095.000,00
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian								

			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian								
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian								
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		18 Laporan	85.335.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36.095.000,00
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	*Jumlah Penangkar yang Diawasi*	-	6 Penangkar	99.970.000,00			-	90.000.000,00
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan								
			0		0 0	99.970.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90.000.000,00

7,	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**1.351.335.750,00**			**-**	**645.012.991,00**
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	-	1.351.335.750,00			-	645.012.991,00
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa								
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		10 Unit	289.707.210,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		336.752.796,00
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		23 Unit	608.258.710,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		208.260.195,00
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		3 Unit	453.369.830,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian								

			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		30 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	J U M L A H					**26.502.756.955,00**				**24.055.593.491,00**

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini merupakan Rencana Kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 dengan tetap menyesuaikan klasifikasi dan kodefikasi nomenklatur sebagaimana diatur dalam Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nunukan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Nunukan, Juli 2024

KEPALA DINAS,

MUHTAR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19661212 200112 1 001